



**Talkshow & Call for Paper:**

**“PERAN EDUPRENEURSHIP SEBAGAI SPIRIT DALAM MEMBANGUN EKONOMI KREATIF”,**

**6 Desember 2023**

Vol. 3, No. 1, Tahun 2023

No. ISSN: 2809-6479

**TRANSPARANSI KEBIJAKAN PUBLIK DAN PENGAWASAN  
INTERNAL TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DI  
MODERASI KOMPETENSI PEGAWAI**

Pipit Shopia<sup>1</sup>, Verliani Dasmaran<sup>2\*</sup>,  
Universitas Mathlaul Anwar Banten

Email: [pipitshofia21@gmail.com](mailto:pipitshofia21@gmail.com), [eeytea@gmail.com](mailto:eeytea@gmail.com)

\*corresponden Author

***Abstract***

*The aim of this research is to determine the significant influence of public policy transparency on the quality of BPKD Pandeglang Regency's financial reports. To determine the significant influence of internal supervision on the quality of BPKD Pandeglang Regency's financial reports. To find out how accountants' competence moderates the influence of public policy transparency on the quality of BPKD Pandeglang Regency's financial reports. To determine the competency of accountants to moderate the influence of internal supervision on the quality of BPKD Pandeglang Regency's financial reports. The research method used is quantitative research, the unit of analysis used in this research is BPKD Pandeglang Regency employees totaling 39 respondents in the accounting and treasury fields and the sample used is a saturated sample. The data collection tool is using a questionnaire and variable measurement using a Likert scale. The results of this research prove that public policy transparency and internal control have a significant effect on the quality of financial reports, but employee competency is not proven to be a moderating variable*

**Keywords:** *Transparency of Public Policy, Internal Control, Employee Competence*

**Abstrak**

Tujuan Penelitian ini adalah Untuk mengetahui pengaruh signifikansi transparansi kebijakan publik terhadap kualitas laporan keuangan BPKD Kabupaten Pandeglang. Untuk mengetahui pengaruh signifikansi pengawasan internal terhadap kualitas laporan keuangan BPKD Kabupaten Pandeglang. Untuk mengetahui kompetensi akuntan memoderasi pengaruh transparansi kebijakan publik terhadap kualitas laporan keuangan BPKD Kabupaten Pandeglang. Untuk mengetahui kompetensi akuntan dapat memoderasi pengaruh pengawasan internal terhadap kualitas laporan keuangan BPKD Kabupaten Pandeglang. Metode penelitian yang digunakan jenis penelitian kuantitatif, unit analisis yang yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pegawai BPKD Kabupaten pandeglang berjumlah 39 responden di bidang akuntansi dan perbendaharaan dan sampel yang digunakan yaitu sampel jenuh. Alat pengumpulan data yaitu menggunakan kuesioner dan pengukuran variabelnya menggunakan skala likert. Hasil penelitian ini membuktikan transparansi kebijakan



## Talkshow & Call for Paper:

### “PERAN EDUPRENEURSHIP SEBAGAI SPIRIT DALAM MEMBANGUN EKONOMI KREATIF”,

6 Desember 2023

Vol. 3, No. 1, Tahun 2023

No. ISSN: 2809-6479

publik dan pengawasan internal berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, tetapi kompetensi pegawai tidak terbukti sebagai variabel moderasi  
Kata Kunci : Trasnparansi kebijakan Publik, Pengawasan Internal, Kompetensi Pegawai

## I. PENDAHULUAN

Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) terus mengalami peningkatan. Ini tecermin dari jumlah capaian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) LKPD yang telah melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. tetapi, masih terdapat 23 Pemerintah daerah (Pemda) yang sampai saat ini belum pernah meraih opini WTP sejak pertama kali diaudit oleh BPK. <https://wartapemeriksa.bpk.go.id/?p=41476>. Sebanyak 23 pemda tersebut terdiri atas 22 pemkab dan satu pemerintah kota yang tersebar di tujuh provinsi. Salah satu indikator kualitas laporan keuangan adalah opini dari kantor akuntans publik atau dari BPK jika pemerintah daerah (Qomah, 2021)

Pemerintah daerah bertanggung jawab atas Dana pusat yang digelontorkan ke daerah melalui DAK maupun Dana Penyesuaian teralokasi secara besar-besaran di infrastruktur, yang menurut beberapa penelitian kami, pos ini paling rawan dikorupsi. Audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sering menemukan ketidakpatuhan, standar pengendalian internal, dan administrasi. Namun rekomendasi yang diberikan (hanya) perbaikan, bukan tindakan tegas. Kasus suap dana PEN berkenaan dengan pengajuan pinjaman dana PEN tahun 2021 sebesar Rp 350 miliar untuk Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara. Ketiga tersangka diduga menerima suap dari Bupati Kolaka Timur nonaktif Andi Merya Nur untuk persetujuan pengajuan pinjaman dana PEN. Jumlah suap yang diterima disebut-sebut mencapai Rp 2,405 miliar. <https://seknasfitra.org/korupsi-sudah-terjadi-sejak-perencanaan-anggaran/>

Korupsi bukan saja terjadi pada saat pelaksanaan, namun juga dalam proses perencanaan, bahkan pada tahap ini bisa dibilang lebih kental. Dalam proses perencanaan anggaran terdapat 5 aspek yang mewarnai, yaitu *top down*, *bottom up*, partisipasi, teknokrasi, dan politik. Proses *top down*, anggaran yang digelontorkan dari pusat ke daerah sudah diatur (*given*), sedangkan *bottom up*, sejauh ini hanya formalitas, karena proses partisipasi dalam perencanaan yang dilakukan bukanlah proses negosiasi, namun hanya sosialisasi dan penyampaian informasi publik. Masyarakat belum dilibatkan dalam perencanaan secara utuh dari awal, dan hanya diberi sosialisasi hasil dari perencanaan yang sudah terbentuk.

Yanti et al., (2020); Ikriyati & Aprila, (2019) mengemukakan rendahnya kualitas laporan keuangan salah satu penyebabnya adalah penyelenggaraan sistem pengendalian intern yang belum memadai. Sistem akuntansi sebagai sistem informasi baik yang disengaja maupun yang tidak sengaja. Kondisi saat ini, banyak permasalahan yang terjadi yaitu berkaitan dengan transparansi kebijakan publik, pengawasan internal, kualitas laporan keuangan, dan komptensi akuntan pemerintah di indonesia (Ramziah, 2020). Organisasi sektor publik sering diartikan



**Talkshow & Call for Paper:**

**“PERAN EDUPRENEURSHIP SEBAGAI SPIRIT DALAM MEMBANGUN EKONOMI KREATIF”,  
6 Desember 2023**

**Vol. 3, No. 1, Tahun 2023**

**No. ISSN: 2809-6479**

sama dengan organisasi pemerintah, namun pada kenyataannya organisasi pemerintah merupakan bagian dari organisasi sektor publik. Organisasi sektor publik sangat erat kaitannya dengan pelayanan publik

Sururi, (2019) mendefinisikan pelayanan publik sebagai proses pemenuhan setiap kebutuhan masyarakat melalui instansi terkait. Pemenuhan kebutuhan tersebut dapat berupa barang dan jasa khususnya jasa dapat berupa angkutan umum seperti pesawat terbang, kereta api, angkutan penyeberangan laut dan angkutan darat, pelayanan kesehatan, dan pelayanan pendidikan. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Pasal 7 ayat 1 mengamanatkan bahwa Pemerintah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah bisa dilaksanakan secara bertahap dari penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis kas menuju akrual menjadi penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual serta memberikan masa transisi untuk perubahan dari kas basis ke akrual basis dalam waktu 5 tahun.

Murapi, (2020) mendapati bahwa kualitas informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pengguna sistem informasi. Temuan tersebut sama dengan penelitian (Tahir et al., 2021)) yang menyimpulkan bahwa kualitas informasi berpengaruh terhadap kepuasan pengguna. Dengan demikian, semakin baik kualitas informasi, pengguna akan merasa semakin puas juga karena informasi yang dihasilkan akan berdampak terhadap pengambilan keputusan yang semakin tepat (Alfiani et al 2022). Juniarta & Sugiarto Asana, (2020) mengatakan bahwa laporan keuangan adalah produk yang harus dihasilkan oleh profesi atau disiplin akuntansi. Oleh karena itu, penyusunan keuangan yang berkualitas membutuhkan pengelolaan Sumber Daya Manusia yang kompeten. Hal yang serupa juga dikemukakan oleh (Kusumawardhani & Muanas, 2020) yang mengatakan bahwa kualitas peaporan keuangan adalah hasil dari informasi yang bermanfaat bagi pemakainya dengan menyediakan informasi tersebut sesuai dengan karakteristik kualitatif kualitas informasi keuangan. Keberhasilan suatu entitas bukan hanya dipengaruhi oleh sumber daya manusia yang dimilikinya melainkan kompetensi sumber daya manusia yang dimilikinya. Dalam hal ini kompetensi sumber daya manusia memiliki peranan yang sangat penting untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan entitas yang bersangkutan (Juniarta & Sugiarto Asana, 2020). Pengawasan internal menjadi point penting untuk menghindari adanya penyalahgunaan wewenang dan kebijakan. Serta pengawasan internal yang akan meningkatkan kinerja pegawai dan kualitas pemerintah daerah (Jatmiko, 2020)

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **Teori Kepatuhan**

Teori kepatuhan merupakan sebuah teori yang menggambarkan suatu kondisi dimana seseorang harus mematuhi sebuah peraturan atau perintah yang telah diberikan (Mawuntu et al., 2020) Teori kepatuhan, dapat mendorong seseorang lebih taat terhadap peraturan yang ada. norma atau kaidah yang berlaku seharusnya teori kepatuhan dapat di terapkan dalam lingkup akuntansi. terlebih kepatuhan dalam pelaporan serta pertanggungjawaban terhadap keuangan yang telah dikelola



## Talkshow & Call for Paper:

### “PERAN EDUPRENEURSHIP SEBAGAI SPIRIT DALAM MEMBANGUN EKONOMI KREATIF”,

6 Desember 2023

Vol. 3, No. 1, Tahun 2023

No. ISSN: 2809-6479

merupakan hal yang mutlak dan harus dipenuhi (Nkundabanyanga et al., 2019). Teori kepatuhan dalam penelitian ini digunakan untuk menjelaskan hubungan antara transparansi publik, pengawasan internal, serta kompetensi pegawai dengan kualitas laporan keuangan.

#### Transparansi Kebijakan Publik

Transparansi Kebijakan Publik Selain adanya akuntabilitas dalam siklus anggaran, transparansi anggaran juga diperlukan untuk meningkatkan pengawasan (Muraina & Dandago, 2020). Transparansi merupakan salah satu prinsip good government. Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah, sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat. Transparansi merupakan salah satu cara untuk mewujudkan pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat (Auyong & Chin, 2019). Melalui transparansi penyelenggaraan pemerintahan, masyarakat diberikan kesempatan untuk mengetahui apa yang terjadi dalam pemerintahan, termasuk diantaranya kebijakan yang akan atau telah diambil oleh pemerintah serta implementasi kebijakan tersebut (Adiputra et al., 2018)

Manfaat penting transparansi mencegah korupsi; lebih mudah mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan; Meningkatkan akuntabilitas pemerintahan sehingga masyarakat akan lebih mampu mengukur kinerja pemerintah; Meningkatkan kepercayaan terhadap komitmen pemerintah untuk memutuskan kebijakan tertentu; Menguatkan kohesi, karena kepercayaan publik terhadap pemerintah akan terbentuk (Jatmiko, 2020). (Ramziah, 2020) menyebutkan indikator-indikator dari transparansi yaitu Penyediaan informasi yang jelas, Kemudahan akses informasi, Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar atau permintaan untuk membayar uang suap, Meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa dan lembaga non pemerintah.

#### Pengawasan Internal

Pengawasan internal berperan penting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan (Asmara & Hamidah, 2022). Novitasari et al., (2020) menegaskan bahwa pengawasan internal merupakan keseluruhan dari proses audit, review, evaluasi, pemantauan serta pengawasan lain akan penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan dengan efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan *good governance*. Pengawasan internal beriringan dengan pengendalian internal (Hassan & Lee, 2019).

Tujuan pengendalian internal adalah untuk mencapai tujuan perusahaan, meminimalisir potensi kejadian di luar rencana, meningkatkan efisiensi, mencegah munculnya kerugian aset, meningkatkan keandalan data pelaporan keuangan, serta mendorong dipatuhinya hukum dan peraturan yang ditetapkan (Abbaszadeh et al., 2019). Tujuan lain dari pengawasan internal yaitu untuk memperoleh informasi yang objektif dari kegiatan yang diawasi (Arifudin, 2020). Hasil audit harus dipublikasikan secara meluas kepada masyarakat, sehingga apa yang disajikan,



## Talkshow & Call for Paper:

**“PERAN EDUPRENEURSHIP SEBAGAI SPIRIT DALAM MEMBANGUN EKONOMI KREATIF”,  
6 Desember 2023**

Vol. 3, No. 1, Tahun 2023

No. ISSN: 2809-6479

dilaporkan, dan di pertanggungjawabkan sesuai keinginan masyarakat dalam kegiatan pelaksanaannya.

Komponen Pengawasan Internal, *Committee of Sponsoring Organizations* (COSO) menyebutkan elemen pengendalian internal terdiri atas lima komponen: Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*); Penaksiran Resiko (*Risk Assessment*); Aktivitas Pengawasan (*Control Activities*); Informasi dan Komunikasi (*Information And Communication*); Pemantauan (*Monitoring*) (Dangi et al., 2020). Indikator Keberhasilan Pengawasan, Meningkatnya disiplin, prestasi dan pencapaian sasaran pelaksanaan tugas. Berkurangnya penyalahgunaan wewenang. Indikator ini dapat dilihat dari berkembangnya hal-hal sebagai berikut: Berkurangnya tuntutan masyarakat terhadap pemerintah, Terpenuhinya hak-hak pegawai negeri dan masyarakat sesuai dengan apa yang menjadi haknya. Sebagai misal, gaji pegawai negeri diterima oleh yang bersangkutan secara tepat waktu dan jumlah, Berkurangnya kebocoran, pemborosan dan pungutan liar, Cepatnya penyelesaian perizinan dan peningkatan pelayanan

### Kualitas Laporan Keuangan

Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah ditentukan oleh banyak faktor, laporan keuangan yang berkualitas menunjukkan bahwa kepala daerah bertanggung jawab sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan kepadanya, dalam pelaksanaan tanggung jawab mengelola organisasi (Alim et al., 2021). Informasi yang terdapat pada laporan keuangan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna (Arthur & Tang, 2017) Laporan keuangan ialah catatan informasi organisasi dalam satu periode akuntansi, yang menjadi gambaran atas kinerja organisasi tersebut. Dalam laporan keuangan tersebut tersusun atas berbagai informasi terkait posisi keuangan dan berbagai transaksi dari organisasi yang melaporkan tersebut. Informasi yang terkandung di dalam laporan keuangan menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang terkandung dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 yaitu relevansi (*relevance*), keterandalan (*reliable*), dapat diperbandingkan (*comparability*), dan dapat dipahami (*understandability*) (Furqan et al., 2020)

### Kompetensi Pegawai

Potensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap upaya organisasi dalam mencapai tujuan. Betapapun majunya teknologi, perkembangan informasi, tersedianya modal dan memadainya bahan, jika tanpa sumber daya manusia sulit bagi organisasi untuk mencapainya (Otoo, 2019). Kualitas sering digunakan ketika kita berbicara tentang peningkatan kemampuan seseorang, ketika kita memperoleh sertifikasi, mengikuti pelatihan atau mengikuti pendidikan (Potnuru et al., 2019) (Tanjung, 2021). Pengertian yang lebih luas, yang sekarang digunakan dalam pembangunan masyarakat, kualitas tidak hanya berkaitan dengan keterampilan dan kemampuan individu, tetapi juga dengan kemampuan organisasi untuk mencapai misinya secara efektif dan kemampuan mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka panjang (Laihonen & Mäntylä, 2017)



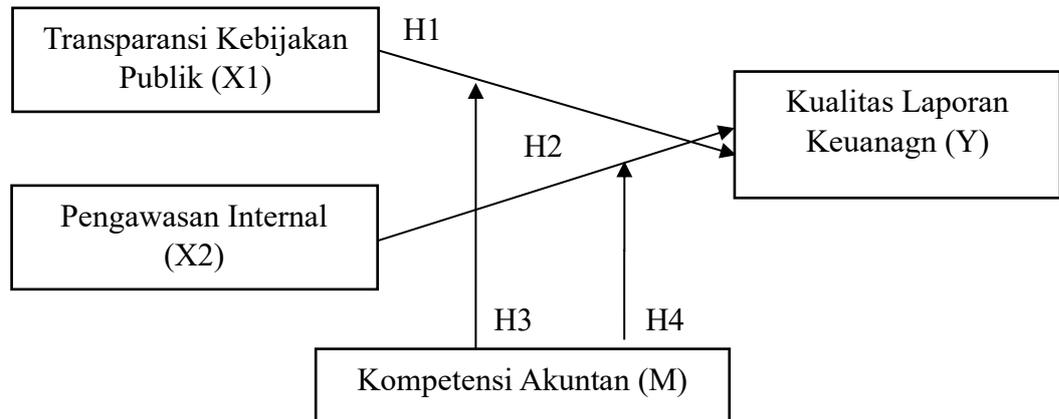
## Talkshow & Call for Paper:

“PERAN EDUPRENEURSHIP SEBAGAI SPIRIT DALAM MEMBANGUN EKONOMI KREATIF”,

6 Desember 2023

Vol. 3, No. 1, Tahun 2023

No. ISSN: 2809-6479



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Berfikir**

### III. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan populasi yang akan diteliti dalam penelitian ini ialah pegawai BPKD (Badan Pengelolaan Keuangan Daerah) kabupaten Pandeglang yang berjumlah 39 responden yang bekerja dibagian akuntansi dan keuangan dan semuanya dijadikan responden. dengan data primer dengan skala likert dibantu dengan SPSS dalam pengolahan data dan pengujian statistik. Keterbaruan dalam penelitian ini pada variabel kompetensi pegawai, mengembangkan (Spencer & Spencer, 1993) dari 5 Indikator yaitu Watak, motif konsep diri, pengetahuan, keterampilan. Dikembangkan menjadi 7 indikator yaitu target capaian dan lingkungan Kerja

### IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Instrumen penelitian sudah lolos uji validasi dan reliabilitas dengan tujuan untuk uji validitas dapat digunakan untuk mengetahui hasil, kesesuaian dan keabsahan teori yang digunakan, sedangkan reliabilitas dapat digunakan untuk mengetahui kekonsistenan hasil dalam waktu, tempat, peneliti dan di berbagai bagian uji itu sendiri (Ghozali, 2019). Hasil penelitian membuktikan bahwa sampel penelitian terdiri dari 70% berjenis kelamin laki-laki dan 30% perempuan, 95% sudah berpendidikan S1 dan hanya 5% yang s2, pengalaman kerja 40% lebih dari 5 tahun 30% memiliki pengalaman 3-5 tahun, dan 30% dibawah 3 tahun.

#### 1) **Transaksi kebijakan Publik berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan**

Hasil penelitian membuktikan dengan nilai signifikansi  $0,045 < 0,05$  artinya  $H_0$  ditolak  $H_a$ , Transparansi merupakan pilar dari Good Governance dan good government. Penyelenggaraan pemerintahan yang transparansi menjadi entry point penting bagi masyarakat dalam mendapatkan informasi sehingga dengan mudah



## Talkshow & Call for Paper:

**“PERAN EDUPRENEURSHIP SEBAGAI SPIRIT DALAM MEMBANGUN EKONOMI KREATIF”,  
6 Desember 2023**

Vol. 3, No. 1, Tahun 2023

No. ISSN: 2809-6479

dapat melakukan check and balance terhadap tata laksana kegiatan yang dilakukan pemerintah daerah. Dengan adanya transparansi kebijakan publik dalam menyelenggarakan dapat menjamin akuntabilitas pembuat kebijakan kepada masyarakat dan hal ini akan mencegah terjadinya korupsi. Semakin berjalan dengan baik pembuatan pelaporan maka kualitas laporan keuangan akan lebih meningkat. Penelitian ini sejalan dengan (Hamsinar, 2022) menyimpulkan bahwa transparansi kebijakan publik berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. (Lastrri & Gunawan, 2020) menyimpulkan transparansi kebijakan publik berpengaruh signifikan terhadap kualitas APBD. Hamriani et al., (2021) menyimpulkan transparansi kebijakan publik berpengaruh terhadap efektifitas kinerja pemerintah daerah

### 2) Pengawasan internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Hasil pengujian membuktikan bahwa pengawasan internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan hal ini terbukti nilai signifikansi  $0,049 < 0,05$ , sehingga  $H_0$  ditolak  $H_a$  diterima. Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dalam organisasi itu sendiri (Zamzami et al., 2021; Rivai & Mulyadi, 2012). Wewenang dari sistem pengawasan internal memiliki akses terhadap seluruh dokumen perusahaan, memonitoring dan melakukan evaluasi tindakan tindak lanjut, memonitoring dan evaluasi tindakan tindak lanjut, meminta rekomendasi, melakukan pengembangan, memiliki wewenang mengembangkan instrumen kertas audit. Berdasarkan tabel 5.10 dapat ditunjukkan bahwa taraf signifikansi level sebesar 5% atau  $\alpha = 0,05$ ,  $df = 39 - 2 = 37$  dihasilkan  $t_{tabel} = 1,687$  (lihat lampiran). Ternyata  $t_{hitung} > t_{tabel}$  atau  $4,097 > 1,687$ , artinya hipotesis alternatif ( $H_a$ ) diterima, dan ( $H_0$ ) ditolak. Jadi kesimpulannya adalah terdapat pengaruh positif dan signifikan pada pengawasan internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Hal ini membuktikan bahwa hipotesis alternatif awal sesuai dengan pengujian hipotesis. Dengan adanya system pengawasan internal yang baik bertujuan agar terhindar dari kecurangan yang mungkin bias terjadi dalam melakukan pelaporan keuangan, agar terciptanya laporan keuangan yang andal dan berkualitas Karena jika pelaporan keuangan yang disajikan dengan transparan maka akan semakin baik. Penelitian ini sesuai dengan penelitian (Zai et al., 2022)) bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan pada akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja dengan efektivitas anggaran. Untuk lebih jelasnya penulis menggambarkan kurva penolakan dan penerimaan  $H_0$  yang dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

### 3) Kompetensi akuntan memoderasi pengaruh transparansi kebijakan publik terhadap kualitas laporan keuangan

Kompetensi pegawai membuktikan dapat memperkuat atau memoderasi pengaruh transparansi kebijakan publik terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini membuktikan bahwa kompetensi pegawai merupakan kemampuan dalam memenuhi persyaratan dan ketentuan yang dibutuhkan oleh lembaga. Pegawai yang kompeten meningkatkan efektivitas dan efisiensi pekerjaan. Dan adanya kompetensi pegawai dapat memberi semangat untuk mendorong yang kuat untuk melakukan publikasi. Publikasi bagian dari transparansi kebijakan. Semakin luas transparansi



## Talkshow & Call for Paper:

### “PERAN EDUPRENEURSHIP SEBAGAI SPIRIT DALAM MEMBANGUN EKONOMI KREATIF”,

6 Desember 2023

Vol. 3, No. 1, Tahun 2023

No. ISSN: 2809-6479

maka akan tercapai indikator kualitas kinerja pemerintahan termasuk kualitas laporan keuangan.

#### 4) Kompetensi Pegawai memoderasi pengaruh pengawasan internal terhadap kualitas laporan keuangan

Dari hasil penelitian ini membuktikan bahwa kompetensi pegawai tidak dapat memoderasi pengaruh pengawasan internal terhadap kualitas laporan keuangan. Dengan nilai signifikansi  $0,880 > 0,05$  dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  diterima  $H_A$  ditolak, Kompetensi pegawai adalah kemampuan personal dari setiap pegawai yang mumpuni untuk melaksanakan kewajiban yang diharapkan (Kismono, 1999), sedangkan pengawasan internal tidak hanya sekedar pegawai yang kompeten yang dibutuhkan tetapi ada hal yang lebih besar seperti adanya sistem yang terstruktur dan komitmen organisasai yang kuat sehingga kecurangan yang terjadi tidak dapat dilaksanakan karena sistem yang kuat, kompetensi pegawai bagaikan dua mata pisau yang harus di sertai dengan kontrol lembaga atau kontrol pemerintah pusat dan daerah agar kompetensi lebih dapat terarah.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### 1) Kesimpulan

Kesimpulan penelitian ini bahwa transparansi kebijakan publik berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, pengawasan internal berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, dan kemoetesi pegawai mampu memoderasi pengaruh transparansi kebijakan publik terhadap kualitas laporan keuangan tetapi kompetensi pegawai tidak dapat memoderasi pengaruh pengawasan internal terhadap kualitas laporan keuangan

### 2) Saran

Rekomendasi yang diberikan

1. Bagi instansi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pandeglang. Kompetensi pegawai menjadi faktor penguat pengaruh transparansi kebijakan publik sehingga kompetensi pegawai perlu di tingkatkan mulai dari perekrutan dengan sistem yang transparansi dan benar benar pegawai yang memenuhi syarat secara kualifikasi tidak ada unsur nepotisme dan sejenisnya, Transparansi kebijakan publik menjadi penting dilakukan dengan berbagai tehnik, terlebih transparansi kebijakan dipublikasi dengan merata maka perlu peninjauan kembali apa sarana prasarana sudah terpenuhi secara merata seperti meratanya sinyal internet diseluruh daerah..
2. Bagi Peneliti Selanjutnya Bagi peneliti selanjutnya diharapkan ada penambahan sampel yang cocok di SKPD lain lebih baik studi komparatif dengan daerah lainnya agar hasilnya lebih maksimal



**Talkshow & Call for Paper:**

**“PERAN EDUPRENEURSHIP SEBAGAI SPIRIT DALAM MEMBANGUN EKONOMI KREATIF”,**

**6 Desember 2023**

Vol. 3, No. 1, Tahun 2023

No. ISSN: 2809-6479

**Acknowledgment**

**Tabel 1. Moderated Regression Analysis**

Coefficients <sup>a</sup>					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-4.812	8.315		-.579	.567
Transparansi Kebijakan Publik	.320	1.119	.336	.286	.045
Pengawasan Internal	.470	.674	.694	.698	.049
Kompetensi Pegawai	.626	.286	.918	2.186	.036
KP^TKP	.005	.033	-.282	-.152	.880
KP*PI	.008	.020	-.715	-.429	.006

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan

**Tabel 2. Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.772 <sup>a</sup>	.595	.573	2.16488

a. Predictors: (Constant), Pengawasan Internal, Transparansi Kebijakan Publik

**Referensi**

- Abbaszadeh, M. R., Salehi, M., & Faiz, S. M. (2019). Association of information technology and internal controls of Iranian state agencies. *International Journal of Law and Management*, 61(1), 133–150. <https://doi.org/10.1108/IJLMA-12-2017-0304>
- Adiputra, I. M. P., Utama, S., & Rossieta, H. (2018). Transparency of local government in Indonesia. *Asian Journal of Accounting Research*, 3(1), 123–138. <https://doi.org/10.1108/AJAR-07-2018-0019>
- Alim, F. A., Mai, M. U., & Setiawan, S. (2021). Analisis Pengaruh Faktor Internal dan Faktor Eksternal terhadap Kinerja Reksa Dana Syariah Saham. *Journal of Applied Islamic Economics and Finance*, 1(2), 435–445. <https://doi.org/10.35313/jaief.v1i2.2476>
- Arthur, N., & Tang, Q. (2017). Ownership Concentration and Financial Reporting Quality: International Evidence. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 11(qq), 1–45.
- Asmara, W. W., & Hamidah, H. (2022). Optimalisasi Kode Etik Aparat Pengawasan



**Talkshow & Call for Paper:**

**“PERAN EDUPRENEURSHIP SEBAGAI SPIRIT DALAM MEMBANGUN EKONOMI KREATIF”,  
6 Desember 2023**

Vol. 3, No. 1, Tahun 2023

No. ISSN: 2809-6479

- Intern Pemerintah (Apip): Meneladani Sifat Rasulullah Saw. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 6(2), 271–291. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2022.v6.i2.5233>
- Auyong, H. N., & Chin, Y. H. (2019). Cleaner production and sustainability: Stakeholder pressure and the adoption of pollution prevention measures of industrial hazardous waste in Malaysia. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 268(1), 1–7. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/268/1/012027>
- Dangi, M. R. M., Nawawi, A., & Salin, A. S. A. P. (2020). Application of COSO framework in whistle-blowing activities of public higher-learning institutions. *International Journal of Law and Management*, 62(2), 193–211. <https://doi.org/10.1108/IJLMA-06-2017-0145>
- Dasmaran, V.-, Yulaeli, T.-, & Selfiani, - -. (2018). Pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Pandeglang. *Jurnal Akuntansi Maranatha*, 10(2). <https://doi.org/10.28932/jam.v10i2.1082>
- Daulay, R., Kurnia, E., & Maulana, I. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Karyawan Pada Perusahaan Daerah di Kota Medan. *Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan*, 1(1), 209–218. <https://doi.org/10.30596/snk.v1i1.3612>
- Dewi, R. T. K., Rahayu, S., & Ridwan, M. (2023). Effects of Audit Fee, Audit Delay, Financial Distress, Audit Opinion and Audit Tenure on Auditor Switching. *Journal of Business Management and Economic Development*, 1(02), 182–196. <https://doi.org/10.59653/jbmed.v1i02.87>
- Firmansyah, I., & Sinambela, R. T. (2021). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat. *Land Journal*, 1(1), 1–15. <https://doi.org/10.47491/landjournal.v1i1.557>
- Furqan, A. C., Wardhani, R., Martani, D., & Setyaningrum, D. (2020). The effect of audit findings and audit recommendation follow-up on the financial report and public service quality in Indonesia. *International Journal of Public Sector Management*, 33(5), 535–559. <https://doi.org/10.1108/IJPSM-06-2019-0173>
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23* (8th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2019). *Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. BPFE Undip.
- Hamriani, DM, R., & Hamzah, M. (2021). Pengaruh akuntabilitas publik, partisipasi masyarakat, dan transparansi kebijakan publik terhadap efektifitas kinerja anggota DPRD Kabupaten Bulukumba. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 2(1), 24–35.
- Hamsinar, H. (2022). Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Akuntabilitas dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Pendidikan Agama Islam Indonesia (JPAIL)*, 3(4), 85–90. <https://doi.org/10.37251/jpail.v3i4.640>
- Hassan, M. H., & Lee, J. (2019). Policymakers’ perspective about e-Government success using AHP approach: Policy implications towards entrenching Good Governance in Pakistan. *Transforming Government: People, Process and*



**Talkshow & Call for Paper:**

**“PERAN EDUPRENEURSHIP SEBAGAI SPIRIT DALAM MEMBANGUN EKONOMI KREATIF”,**

**6 Desember 2023**

Vol. 3, No. 1, Tahun 2023

No. ISSN: 2809-6479

- Policy*, 13(1), 93–118. <https://doi.org/10.1108/TG-03-2018-0017>
- Hutagaol, S. M., Arif Nasution, M., & Kadir, A. (2020). Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Kabupaten Pakpak Bharat Improvement of Community Participation in Management of Household Waste in Pakpak Bharat District. *Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 2(2), 204–2016. <http://jurnalmahasiswa.uma.ac.id/index.php/tabularasa>
- Ikriyati, T., & Aprila, N. (2019). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah, Dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma. *Jurnal Akuntansi*, 9(2), 131–140. <https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.9.2.131-140>
- Ismi Ramadina, I., & Firmansyah. (2020). Pengaruh Motivasi Dan Disiplin Kerja terhadap Produktivitas Karyawan pada PT. Nusa Surya Ciptadana Kota Sukabumi. *Jurnal Mahasiswa Manajemen*, 1(2), 185–204. <https://journal.stiepasim.ac.id/index.php/JMM/article/view/177>
- Jatmiko, B. (2020). Pengaruh Pengawasan Internal, Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman (Survei Pada Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sleman). *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 7(2), 231–246. <https://doi.org/10.25105/jat.v7i2.7446>
- Juniartha, I. W., & Sugiarto Asana, G. H. (2020). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Gianyar. *Journal Research of Accounting*, 1(2), 165–180. <https://doi.org/10.51713/jarac.v1i2.16>
- Karim, D. F. (2019). Pengaruh Tunjangan Kinerja Daerah (Tkd) Terhadap Kinerja Pegawai Pada Lingkup Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Bangga. *Jurnal Imiah Clean Government*, 2(2), 189–201.
- Kismono, G. (1999). Perubahan Lingkungan, Transformasi Organisasional Dan Reposisi Peran Fungsi Sumberdaya Manusia. *Jurnal I-Lib UGM*, 14.
- Kusumawardhani, F., & Muanas, M. (2020). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Kualitas Laporan Keuangan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 8(2), 137–146. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v8i2.372>
- Laihonen, H., & Mäntylä, S. (2017). Journal of Knowledge Management Knowledge. In *Journal of Knowledge Management*.
- Lastri, S., & Gunawan, B. (2020). Pengaruh Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Pada Kantor Dpr Aceh). *Jurnal Akuntansi Muhammadiyah*, 10(2), 207–215. <https://doi.org/10.37598/jam.v10i2.845>
- Lusiyana, D., Susbiyani, A., & Eko, D. (2020). Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *BUDGETING : Journal of Business, Management and Accounting*, 2(1), 140–154. <https://doi.org/10.31539/budgeting.v2i1.1225>
- Mawuntu, N. S., Manossoh, H., & Afandi, D. (2020). Pengaruh Kepatuhan Dan Pengawasan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara). *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 15(2), 260. <https://doi.org/10.32400/gc.15.2.28230.2020>



**Talkshow & Call for Paper:**

**“PERAN EDUPRENEURSHIP SEBAGAI SPIRIT DALAM MEMBANGUN EKONOMI KREATIF”,**

**6 Desember 2023**

**Vol. 3, No. 1, Tahun 2023**

**No. ISSN: 2809-6479**

- Muis, A. R. C. (2020). Transparansi Kebijakan Publik Sebagai Strategi Nasional Dalam Menanggulangi Pandemi Covid-19. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 7(5). <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i5.15317>
- Muraina, S. A., & Dandago, K. I. (2020). Effects of implementation of International Public Sector Accounting Standards on Nigeria’s financial reporting quality. *International Journal of Public Sector Management*, 33(2–3), 323–338. <https://doi.org/10.1108/IJPSM-12-2018-0277>
- Murapi, I. (2020). Pengaruh Sitem Akuntansi Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah. *Riset, Ekonomi, Akuntansi Dan Perpajakan (Rekan)*, 1(1), 1–9. <https://doi.org/10.30812/rekan.v1i1.660>
- Nkundabanyanga, S. K., Nakyeyune, G. K., & Muhwezi, M. (2019). Management mechanisms, deterrence measures and public finance regulatory compliance in Uganda. In *Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management* (Vol. 31, Issue 2). <https://doi.org/10.1108/JPBAFM-02-2018-0008>
- Novitasari, D. R., Jatmiko, T., & Prabowo, W. (2020). PENGARUH PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN PENGAWASAN INTERNAL TERHADAP KINERJA PEMERINTAH (Studi Kasus Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Semarang). *Diponegoro Journal of Accounting*, 9(2), 1–8. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Nugroho, F. A., & Setyowati, W. (2019). Pengaruh Komitmen Organisasional, Sistem Informasi Akuntansi, Dan Peran Audit Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *ECONBANK: Journal of Economics and Banking*, 1(2), 125–134. <https://doi.org/10.35829/econbank.v1i2.45>
- Otoo, F. N. K. (2019). Human resource development (HRD) practices and banking industry effectiveness: The mediating role of employee competencies. *European Journal of Training and Development*, 43(3–4), 250–271. <https://doi.org/10.1108/EJTD-07-2018-0068>
- Philadelphina, I. S., Suryaningsum, S., & Sriyono, S. (2020). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Standar Akuntansi Pemerintah, Good Governance, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *J-ISCAN: Journal of Islamic Accounting Research*, 2(1), 17–35. <https://doi.org/10.52490/j-iscan.v2i1.777>
- Pina, V., & Torres, L. (2019). Online transparency and corporate governance in Spanish governmental agencies. *Online Information Review*, 43(4), 653–675. <https://doi.org/10.1108/OIR-03-2018-0102>
- Potnuru, R. K. G., Sahoo, C. K., & Sharma, R. (2019). Team building, employee empowerment and employee competencies: Moderating role of organizational learning culture. *European Journal of Training and Development*, 43(1–2), 39–60. <https://doi.org/10.1108/EJTD-08-2018-0086>
- Qomah, S. (2021). Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 8(1), 95–108. <https://doi.org/10.25105/jat.v8i1.8718>
- Ramziah, M. (2020). Pengaruh Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan



**Talkshow & Call for Paper:**

**“PERAN EDUPRENEURSHIP SEBAGAI SPIRIT DALAM MEMBANGUN EKONOMI KREATIF”,**

**6 Desember 2023**

Vol. 3, No. 1, Tahun 2023

No. ISSN: 2809-6479

- Terhadap Pengawasan Anggaran Dana Desa Di Kecamatan Delima Kabupaten Pidie. *Jurnal Sains Riset*, 9(3), 1–8. <https://doi.org/10.47647/jsr.v9i3.156>
- Safitri, E., Amiruddin, Selong, A., Tenriwaru, & Basalamah, M. S. A. (2023). Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Center of Economic Students Journal*, 6(1), 22–30. <https://doi.org/10.56750/csej.v6i1.521>
- Spencer, L. M., & Spencer, J. S. M. (1993). Competence At Work - Models for Superior Performance - Spencer, Lm, Spencer, Sm. *Personnel Psychology*, 47(2), 448–452. <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/wicaksana/article/view/1494>
- sugiyono. (2020). *metodelogi penelitian*.
- Sururi, A. (2019). Inovasi Kebijakan Organisasi Sektor Publik Menuju Terwujudnya Good Public Policy Governance. *Jurnal Good Governance*, 15(1), 85–96. <https://doi.org/10.32834/gg.v15i1.96>
- Syarifudin Akhmad. (2014). Pengaruh Kompetensi SDM dan Peran Audit Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Variabel Intervening Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (studi empiris pada Pemkab Kebumen) Akhmad Syarifudin. *Jurnal Fokus Bisnis, Volume 14, No 02, Desember 2014, 14(25)*, 26–44.
- Tahir, S. Y., Malia, E., & Faisol, I. A. (2021). Pengaruh Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, Pengetahuan Kepala Desa, Dan Transparansi Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Desa Di Kabupaten Pamekasan. *Journal of Accounting and Financial Issue (JAFIS)*, 1, 20–29. <https://doi.org/10.24929/jafis.v1i1.1203>
- Warjiyo, P., & Juhro, S. M. (2019). Policy Transparency and Communication Strategy. In *Central Bank Policy: Theory and Practice* (Issue 1963). <https://doi.org/10.1108/978-1-78973-751-620191017>
- Widiyanti, N. W., Airlangga, A. J., Jember, U., & Jember, U. (2018). Pengungkapan Sumber Daya Manusia Dan Pengaruhnya Terhadap Citra Perusahaan. *Prosiding Seminar Nasional Dan Call For Paper Ekonomi Dan Bisnis, 2017(March)*, 27–28.
- Yanti, N. S., Made, A., & Setiyowati, S. W. (2020). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Dan Pengawasan Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 8(1), 1–8. <https://doi.org/10.21067/jrma.v8i1.4455>
- Zai, B. I., Waruwu, E., Telaumbanua, E., Pengawasan, P., Terhadap, I., Pegawai, K., Dinas, P., Zai, B. I., Waruwu, E., & Telaumbanua, E. (2022). *THE EFFECT OF INTERNAL SUPERVISION ON EMPLOYEE PERFORMANCE AT THE* *Jurnal EMBA Vol . 10 No . 4 Oktober 2022 , Hal . 1209-1224. 10(4)*, 1209–1224.
- Zamzami, F., Nusa, N. duta, & Faiz, I. A. (2021). *Sistem Informasi Akuntansi*. Universitas Gajah Mada.
- Zuraidah, E. (2018). Knowledge Management System Untuk SDM Menggunakan Seci Model (Studi Kasus: Koperasi Karyawan). *Jurnal Informatika*, 5(1), 157–



**Talkshow & Call for Paper:**

**“PERAN EDUPRENEURSHIP SEBAGAI SPIRIT DALAM MEMBANGUN EKONOMI KREATIF”,  
6 Desember 2023**

Vol. 3, No. 1, Tahun 2023

No. ISSN: 2809-6479

168. <https://doi.org/10.31311/ji.v5i1.2481>

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah  
Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan  
Peraturan Pemerintah (PP) No. 71/2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan  
bagian Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah  
Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 yaitu relevansi (*relevance*), keterandalan  
(*reliable*), dapat diperbandingkan (*comparability*), dan dapat dipahami  
(*understandability*).

<https://wartapemeriksa.bpk.go.id/?p=41476>